

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Sosial Modal

Istilah “Modal” banyak digunakan dalam analogi bentuk-bentuk modal ekonomi. Dalam pendekatan produksi, sumberdaya utama untuk menentukan tingkat produksi adalah kekayaan alam, modal manusia, modal fisik, modal keuangan, dan modal sosial (DFID 1999; Sakata 2004). Teknologi, kekayaan alam, modal fisik, modal keuangan dan sumberdaya manusia merupakan faktor penting dalam menentukan kapasitas masyarakat untuk menghasilkan suatu produk dalam mendukung kesejahteraan ekonomi. Namun demikian, faktor produksi tersebut belum mampu melihat tingkat interdependensi antar individu dalam masyarakat kalau tidak didukung oleh faktor institusi dan nilai yang berlaku di masyarakat. Determinan kesejahteraan (*well-being*) hanya terbatas pada faktor fisik (alam, ekonomi, dan sumberdaya manusia), dan sedikit sekali melihat kesejahteraan dalam konteks modal sosial. Padahal modal sosial merupakan sumberdaya terpenting dalam kehidupan masyarakat karena modal ini merupakan jaringan/hubungan keluarga terhadap dunia luar baik bersifat formal maupun informal untuk memecahkan berbagai persoalan yang ada di masyarakat termasuk masalah peningkatan kesejahteraan keluarga.

Modal sosial berbeda dengan istilah populer lainnya, yaitu modal manusia (*human capital*). Pada modal manusia segala sesuatunya lebih merujuk ke dimensi individual yaitu daya dan keahlian yang dimiliki oleh seorang individu. Pada modal sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan pola-pola hubungan antar individu dalam suatu kelompok dan antar kelompok dengan ruang perhatian pada jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan antarsesama yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok. Selain itu, modal sosial juga digunakan untuk memahami berbagai masalah sosial yang lain. Konsep modal sosial dapat dipakai untuk memahami berfungsinya pasar, dimana adanya modal sosial menurunkan biaya transaksi. Karena adanya kepercayaan dalam

bertransaksi akan menghilangkan atau meminimkan kontrak-kontrak resmi (Fukuyama, 2000, dan Coleman,2000).

Fukuyama (2000) mendefinisikan modal sosial sebagai norma I yang dapat mendorong kerjasama antar anggota masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, modal sosial akan tampak dari suasana saling percaya antar warga masyarakat. Fukuyama (2000) berpendapat bahwa ada hubungan erat antara modal sosial dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat atau bangsa. Negara atau bangsa-bangsa yang tingkat kesejahteraannya tinggi adalah bangsa-bangsa yang memiliki modal sosial tinggi argumennya, rasa saling percaya antar warga masyarakat dan kemauan untuk bekerjasama menyebabkan “biaya transaksi” dan “biaya kontrol” menjadi rendah, dan hasilnya adalah kehidupan yang lebih efisien dan produktif. Dengan demikian, sumber daya yang ada, dapat dioptimalkan untuk melakukan kegiatan yang membangun nilai tambah bagi kehidupan masyarakatnya. Melalui kegiatan yang membangun nilai tambah inilah maka *multiplier effects* bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat terwujud.

Bourdieu dengan karya tulisannya berjudul *Form of Sosial Capital* (www.google.com – *social capital: civic community and education/social_capital*) Menjelaskan modal sosial sebagai berikut :

“Sosial capital is ‘the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession of a durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition” (Bourdieu 1983: 249)

Modal sosial adalah sekumpulan sumber daya yang aktual atau potensial yang terhubung dengan kepemilikan sebuah jaringan yang tahan lama dalam hubungan pengenalan dan pengakuan timbal balik yang kurang atau lebih terinstitusionalisasikan atau terlembaga. Dalam pemikiran tekonomi tradisional, istilah “modal” berarti sejumlah uang yang dapat diinvestasikan dengan harapan akan memperoleh keuntungan di masa depan. (Field, 2003:12).

Sedangkan Putnam dalam artikelnya yang berjudul *Bowling Alone: America’s Declining Sosial Capital* dalam *Journal of Democracy* di situs www.eaglenet.lambuth.edu menjelaskan modal sosial sebagai berikut :

“... physical capital refers to physical objects and human capital refers to the properties of individuals, sosial capital refers to connections among individuals – sosial networks and the norms of reciprocity and trustworthiness that arise from them.....”

“.....A society of many virtuous but isolated individuals is not necessarily rich in sosial capital” (Putnam 2000: 19).

Modal fisik mengacu pada obyek fisik dan modal manusia mengacu pada kekayaan atau perlengkapan individu. Sedangkan modal sosial mengacu pada koneksi atau hubungan antara individu – jaringan-jaringan sosial dan norma-norma dari hubungan timbal balik dan kepercayaan yang muncul pada masyarakat. Suatu masyarakat meskipun dengan memiliki sifat budi luhur atau baik tetapi merupakan individu yang terisolasi atau mengikat diri tidaklah terlalu banyak dibutuhkan di dalam perkembangan modal sosial.

Modal sosial mengacu kepada hubungan pribadi dan interaksi antar-pribadi bersama dengan seperangkat nilai-nilai bersama yang diasosiasikan dengan hubungan dan kontak semacam itu. *Lin dkk* (2001) menyamakan hubungan-hubungan tersebut dengan jaringan sosial “hubungan sosial antara pelaku-pelaku individual, grup dan organisasi yang berguna sebagai sumber daya untuk menghasilkan pengembalian yang bersifat positif (hal6).” (Sosial Partnership In The Making : Trust, Reciprocity and Sosial Capital at HERO)

Saling percaya dan kesediaan serta kerelaan dari setiap anggota kelompok untuk saling tolong menolong merupakan modal sosial terpenting dalam suatu kelompok untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan bersama.

Meskipun interaksi terjadi karena berbagai alasan, manusia berinteraksi berkomunikasi dan kemudian menjalin kerjasama pada dasarnya dipengaruhi oleh keinginan untuk berbagi cara mencapai tujuan bersama yang tidak jarang berbeda dengan tujuan dirinya sendiri secara pribadi. Keadaan ini terutama terjadi pada interaksi yang berlangsung relatif lama hingga melahirkan modal sosial, yaitu ikatan-ikatan emosional yang menyatukan orang untuk mencapai tujuan bersama, kemudian menumbuhkan kepercayaan dan keamanan yang tercipta dari adanya

relasi yang relatif panjang. Modal sosial seperti ini dapat dilihat sebagai sumber yang dapat digunakan baik untuk kegiatan produksi saat ini, maupun untuk diinvestasikan bagi kegiatan di masa depan. (Edi Suharto, 2006)

Lyda Judson Hanifan (1916,1920) memiliki kajian tentang suatu unit sosial yang didalamnya terjadi pola-pola hubungan timbal-balik yang didasari oleh prinsip-prinsip kebajikan bersama (*sosial virtues*), simpati dan empati serta tingkat kohesifitas hubungan antar individu dalam kelompok (*sosial cohesivity*).

Modal sosial memiliki peranan yang penting dalam memfungsikan dan menguatkan kehidupan modern (dalam Hasbullah;2006). Hal tersebut dilihat dari pemahaman dari modal sosial yang diyakini sebagai komponen penting dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, kesaling percaya dan kesaling menguntungkan.

Marnia Nes juga menambahkan bahwa modal sosial merupakan kemampuan masyarakat untuk bekerjasama demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi. Tujuan bersama ini terkait dengan kemakmuran, kesejahteraan, kesuksesan dan lain-lain. Beberapa hal tersebut akan mudah dicapai oleh suatu masyarakat apabila satu sama lain memiliki kepercayaan yang kuat. Kemampuan bekerjasama muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau di bagian – bagian paling kecil dalam masyarakat. Modal sosial bisa dilembagakan (menjadi kebiasaan) dalam kelompok yang paling kecil ataupun dalam kelompok masyarakat yang besar seperti negara.

Pilar modal sosial, menurut Paldam (2000), adalah kepercayaan (trust), eksistensi jaringan (network), dan kemudahan bekerja sama (ease of cooperation). Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa modal sosial adalah kerja sama antarwarga atau antar individu untuk menghasilkan tindakan kolektif.

Masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi cenderung bekerja secara gotong-royong, merasa aman untuk berbicara dan mampu mengatasi perbedaan-perbedaan. Sebaliknya, pada masyarakat yang memiliki modal sosial rendah akan tampak adanya kecurigaan satu sama lain, merebaknya ‘kelompok kita’ dan

'kelompok mereka', tiadanya kepastian hukum dan keteraturan sosial, serta seringnya muncul 'kambing hitam'.

Modal sosial memiliki banyak unsur yang mendukung dan membentuknya. Rusdi Syahra menjelaskan modal sosial memiliki sepuluh unsur sebagai berikut :

1. Kepercayaan (*trust*) adalah kecenderungan untuk menepati sesuatu yang telah dikatakan baik secara lisan ataupun tulisan. Hubungan yang familiar dan stabil di kalangan pelaku-pelaku sosial dalam organisasi dapat mengurangi keraguan para partisipan struktur sosial mengenai motivasi orang lain dan meredakan kegelisahan akan tindakantindakan orang lain yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Agar orang-orang dengan kepentingan berbeda dapat bekerjasama untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah mereka tetapkan, mereka tidak hanya perlu mengetahui satu sama lain tetapi juga mempercayai satu sama lain untuk mencegah adanya eksploitasi maupun kecurangan dalam hubungan mereka. (Coleman, (1998):102-104).
2. Solidaritas, kesediaan untuk secara sukarela ikut menanggung suatu konsekuensi sebagai wujud adanya rasa kebersamaan dalam menghadapi suatu masalah.
3. Toleransi, kesediaan untuk memberikan konsensi atau kelonggaran baik dalam bentuk materi maupun non materi sepanjang tidak berkenan dengan hal-hal yang bersifat prinsipil.
4. Tanggung jawab adalah kesadaran untuk memenuhi kewajiban sebagai cerminan rasa peduli terhadap masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama.
5. Kerjasama adalah suatu keadaan yang mencerminkan kesediaan dari semua pihak yang terlibat memberikan kontribusi yang seimbang dalam melakukan berbagai hal yang menyangkut kepentingan bersama. Kerjasama juga merupakan upaya penyesuaian dan koordinasi tingkah laku yang diperlukan untuk mengatasi konflik ketika tingkah laku seseorang atau kelompok dianggap menjadi hambatan oleh kelompok lain, sehingga akhirnya tingkah laku mereka bisa cocok satu sama lain.

6. Kebersamaan adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan adanya kesediaan untuk terlibat dalam kegiatan yang menyangkut kepentingan bersama.
7. Kemandirian adalah sikap dan perilaku yang mengutamakan kemampuan sendiri untuk memenuhi berbagai kebutuhan tanpa tergantung kepada atau mengharapkan bantuan orang lain.
8. Keterbukaan adalah kesediaan menyampaikan secara apa adanya segala hal yang orang lain yang berkepentingan menganggap bahwa mereka perlu mengetahuinya.
9. Keterusterangan adalah kesediaan untuk menyampaikan secara apa yang sesungguhnya yang dipikirkan atau dirasakan tanpa dihalangi oleh perasaan ewuh, pekewuh, sungkan atau takut.
10. Empati adalah kemampuan memahami apa yang dirasakan oleh orang lain atau kemampuan untuk menempatkan diri dalam situasi orang lain.

B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dilahirkan dari bahasa Inggris, yakni *empowerment*, yang mempunyai makna dasar ‘pemberdayaan’, di mana ‘daya’ bermakna kekuatan (*power*). Bryant & white (1997) menyatakan pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat miskin. Cara dengan menciptakan mekanisme dari dalam (*build-in*) untuk meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang adil, yakni dengan menjadikan rakyat mempunyai pengaruh. Sementara Freire (Sutrisno, 1999) menyatakan *empowerment* bukan sekedar memberikan kesempatan rakyat menggunakan sumber daya dan biaya pembangunan saja, tetapi juga upaya untuk mendorong mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur yang opresif.

Usman (1995) menjelaskan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) dapat didefinisikan sebagai “upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat”. Dalam konteks ini, secara implisit pemberdayaan mengandung unsur “partisipasi” yang seharusnya dimunculkan dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Sedangkan dalam hal ini Pearse dan Stiefel (1979) membedakan istilah “pemberdayaan partisipatif” yang mengandung bentuk-

bentuk seperti: menghormati kekhasan lokal, dekonsentrasi kekuasaan, dan peningkatan kemandirian.

Pemberdayaan masyarakat lokal adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang bukan sebagai sistem klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik dari memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan. Pengembangan masyarakat lokal pada dasarnya merupakan proses interaksi antara anggota masyarakat setempat yang difasilitasi oleh pekerja sosial. Pekerja sosial membantu meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan (Suharto 2005).

Shardlow (1998) menyatakan bahwa pemberdayaan akan dikatakan berhasil jika masyarakat atau kelompok mengalami keadaan yang berdaya atau mengalami keberdayaan, sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk menopang kebutuhannya sendiri. Individu, atau komunitas yang mampu mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan kesejahteraan hidupnya, maka inilah yang disebut keberdayaan. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai tujuan. Sedangkan memberdayakan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, keterbelakangan, ketidakmampuan, dan musibah yang melanda. (Ratna Devi, 2006)

Pemberdayaan dalam Bahasa Inggris adalah *empowerment*. Kata *power* dalam *empowerment* diartikan "daya" sehingga *empowerment* diartikan sebagai pemberdayaan atau memberikan daya. Daya dalam arti kekuatan yang berasal dari dalam, tetapi dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar. Pemberdayaan pada dasarnya memberikan kekuatan kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya (*powerless*) agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar pengembangan diri. Pemberdayaan yang dimaksud tidak

hanya mengarah pada individu semata, tapi juga kolektif (*Harry Hikmat, 2001: 46-48*).

Menurut *Payne*, tujuan utama pemberdayaan adalah membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan, yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.

Dijelaskan pula konsep pemberdayaan menurut *Parkins, Douglas, Zimmerman dan Marc*, di dalam *American Journal of Community Psychology* di situs [www. people.vanderbilt.edu/douglas.d.perkins/empintro. proquest.pdf](http://www.people.vanderbilt.edu/douglas.d.perkins/empintro.proquest.pdf) yaitu : *“Empowerment is construct that links individual strengths and competencies, natural helping systems, and proactive behaviors to sosial policy and sosial change (rappaport, 1981, 1984). Empowerment oriented interventions enhance wellness while they also aim to ameliorate problems, provide opportunities for participants to develop knowledge and skills, and engage professionals as collaborators instead of autjoritative experts...”*.(*Parkins, Douglas. D; Zimmerman and Marc A 1995; 23, 5; pg. 595*).

Pemberdayaan membangun hubungan kekuatan dan kemampuan individu dengan sistem bantuan yang alami, dan perilaku proaktif menuju kebijakan sosial dan perubahan sosial. Pemberdayaan berorientasi pada intervensi peningkatan yang baik, selama mereka juga memiliki tujuan untuk memperbaiki masalah, menyediakan kesempatan untuk anggotanya atau individu untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan, serta melibatkan para professional yang berkolaborasi atau bekerjasama sebagai pengganti tenaga ahli. Pemberdayaan tak lepas dari peran serta pihak luar kelompok sebagai pendukung dan fasilitator dalam memperoleh kekuatan atau keberdayaan kembali.

Menurut *Tjandraningsih (1996:3)*, pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan menurut *Drajat Trikartono (2000)* adalah membuat menjadi punya *power* atau daya untuk melakukan sesuatu. *Margono Slamet (dalam Totok*

Mardikanto, 2001) menegaskan bahwa. memberdayakan berarti memberi daya kepada yang tidak berdaya dan atau mengembangkan daya yang sudah dimiliki menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Kartasasmita (1995) dalam (Vidhyandika Moeljarto, 1996) “Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya”. Oleh karena dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan memiliki unsur-unsur, yaitu adanya upaya memberi daya/kekuatan dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran (Ratna Devi, 2006).

Pemberdayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah upaya membuat sesuatu berkemampuan atau berkekuatan. Ada beberapa upaya dalam pemberdayaan yang terkait dengan penelitian ini, antara lain :

- a) Pemberdayaan dilakukan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam rangka memperkuat potensi ini, upaya yang perlu dilakukan adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, dan akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.
- b) Pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi kelompok berarti berupaya melindungi untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang (Warta Demografi, 1997).

Selanjutnya harus menggunakan pendekatan kelompok dan partisipasi kelompok karena secara sendiri-sendiri warga masyarakat yang kurang berdaya sulit untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Organisasi adalah salah satu sumber *power* yang penting, maka untuk *empowerment*, pengorganisasian masyarakat ini menjadi penting sekali.

Menurut Girvan (2006), pemberdayaan dilihat dari tujuan yang ingin didapatkan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin atau lemah yang menjadi berdaya, memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya

baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai atau membangkitkan atau mempertahankan mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan kelompok (pelatihan, kursus, pertemuan rutin, dan lain-lain), dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Tri Widodo W. Utomo (2003) dalam "Beberapa Permasalahan dan Upaya Akselerasi Program Pemberdayaan" menjabarkan kategorisasi pemberdayaan menjadi 5 (lima) kelompok besar pemberdayaan. Penelitian ini mengacu pada 3 kategori pemberdayaan, yakni:

1. Penyediaan akses yang lebih terbuka, luas dan lebar terhadap sumber-sumber daya seperti modal, informasi, kesempatan berusaha dan memperoleh kemudahan / fasilitas. Aktifitas didalamnya antara lain; pemberian pinjaman lunak, penerbitan dan penyebaran bulletin/pamflet, subsidi bagi pengusaha lemah dan sebagainya.
2. Pengembangan potensi masyarakat baik dalam pengertian SDM maupun kelembagaan masyarakat. Setiap upaya untuk merubah kondisi dari bodoh menjadi pintar, dari tidak mampu menjadi mampu, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tuna keterampilan menjadi terampil, dan sebagainya, jelas sekali merupakan program pemberdayaan. Aktivitas semacam pelatihan, penyuluhan dan kursus-kursus yang diselenggarakan secara sistematis dengan tujuan memperkuat potensi masyarakat, adalah contoh nyata dari aksi pemberdayaan.
3. Penyertaan masyarakat atau kelompok masyarakat dalam proses perumusan perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan atau kelompok. Seiring dengan paradigma pembangunan yang bertumpu dan berorientasi pada rakyat (*people-based and people-oriented development*), rakyat harus diakui dan ditempatkan sebagai elemen kunci dalam perumusan perencanaan dan implementasi kebijakan-kebijakan pembangunan atau kelompok.

Kategori pemberdayaan yang lain adalah :

4. Peningkatan keseimbangan antara sebuah kondisi yang memiliki keunggulan dengan kondisi lain yang tidak memiliki keunggulan.

5. Penyediaan stimulus untuk membangkitkan swadaya dan swakelola dalam bidang pelayanan umum atau infrastruktur umum. Hal ini terkait dengan pembangunan, khususnya di perkotaan.

C. Modal sosial dan Pemberdayaan Dalam pendekatan pembangunan *Bottom-up* (Level Mikro)

Perencanaan dan implementasi pembangunan dengan sistem “*bottom-up*” artinya adalah perencanaan yang dilakukan dimana masyarakat lebih berperan dalam hal pemberian gagasan awal sampai dengan mengevaluasi program yang telah dilaksanakan sedangkan pemerintah-pemerintah hanya sebagai fasilitator dalam suatu jalannya program. Pendekatan *bottom-up* yaitu pendekatan pembangunan berbasis komunitas merupakan strategi yang dipercaya dalam mempromosikan model yang lebih partisipatif dalam pembangunan integritas dan sinergi yang tinggi menghasilkan kesempatan-kesempatan sosial (*social opportunity*) yang menunjukkan kepercayaan tinggi keluarga maupun umum, dengan kepentingan umum lebih diutamakan dalam semua kegiatan sosial dan ekonomi. Pencapaian kuadran ini menunjukkan keberhasilan pembangunan sistem “*bottom-up*” yang dicirikan oleh adanya integrasi dan hubungan baik berbagai sumberdaya dalam masyarakat dalam mendukung kesejahteraan bersama (Putnam, 2003).

D. Modal Sosial dan Pemberdayaan dalam Pendekatan Pembangunan *Top-down* (Level Makro)

Perencanaan pembangunan dengan sistem “*top-down*” artinya adalah perencanaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan sebagai pemberi gagasan awal serta pemerintah berperan lebih dominan dalam mengatur jalannya program yang berawal dari perencanaan hingga proses evaluasi, dimana peran masyarakat tidak begitu berpengaruh. Kelebihan dari model “*top-down*” adalah: (1) Masyarakat tidak perlu bekerja serta memberi masukan program tersebut sudah dapat berjalan sendiri karena adanya peran pemerintah yang optimal, (2) Hasil yang dikeluarkan bisa optimal dikarenakan biaya yang/dikeluarkan ditanggung

oleh Pemerintah, (3) Mengoptimalkan kinerja para pekerja di pemerintahan dalam menyelenggarakan suatu program.

E. Modal Sosial dan Pemberdayaan Dalam Model Gabungan *Bottom-up* dan *Top-down* Pembangunan

Pada model gabungan, pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep *top-down* dan *bottom-up*, antara *growth strategy* dan *people centered strategy*. Konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*Community Development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*Community Based Development*). Pembangunan dengan sistem gabungan dari kedua sistem diatas (*Bottom-up* dan *Top-down*) adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan program yang diinginkan oleh masyarakat yang merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah dan juga masyarakat sehingga peran antar satu dan keduanya saling berkaitan. Bila dilihat dari kekurangan serta kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing sistem tersebut maka sistem yang dianggap paling baik adalah suatu sistem gabungan dari kedua jenis sistem tersebut karena banyak sekali kelebihan yang terdapat didalamnya antara lain adalah selain masyarakat mampu berkreasi dalam mengembangkan ide-ide mereka sehingga mampu berjalan beriringan bersama dengan pemerintah sesuai dengan tujuan utama yang diinginkan dalam mencapai kesuksesan dalam menjalankan suatu program tersebut.

F. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

Secara umum, kesejahteraan merupakan kondisi telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia sesuai dengan standar kualitas hidup manusia. Kesejahteraan dibagi menjadi dua yaitu kesejahteraan lahir dan kesejahteraan batin. Kesejahteraan lahir biasanya diukur secara ekonomi misalnya tercukupinya kebutuhan lahir manusia seperti kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan pakaian, perumahan, dan lainnya. Kesejahteraan ini biasanya diinterpretasikan dari pendapatan. Sedangkan kesejahteraan batin diukur secara batiniyah yaitu ketentraman, kedamaian, hubungan kekeluargaan, dan lain-lain. Kesejahteraan

batin ini di interpretasikan dari relasi sosial atau kemanusiaan yang dapat menciptakan suasana damai dalam keberagaman sosial (Qomariah, 2009).

Dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir ada beberapa indikator yang digunakan seperti indikator Perubahan Pendapatan Nelayan dan indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN). Ditjen Pesisir dan pulau-pulau Kecil (P3K) (2007), mengembangkan konsep dalam penyusunan indikator kesejahteraan masyarakat pesisir adalah dengan menggunakan Konsep Pemetaan Kemiskinan (*Poverty Mapping*).